

**PERAN SERTA LSM DALAM PENGAWASAN INOVASI
KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH PANTAI (STUDI
DI WALHI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Oleh

REGITA MEIRENDRA PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN SERTA LSM DALAM PENGAWASAN INOVASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH PANTAI (STUDI DI WALHI KOTA BANDAR LAMPUNG)

By

REGITA MEIRENDRA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran serta LSM dalam pengawasan inovasi kebijakan penanganan sampah pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan inovasi kebijakan pantai dalam pengelolaan sampah di pesisir pantai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran serta LSM dalam pengawasan inovasi kebijakan penanganan sampah pantai di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program bank sampah dalam pengelolaan sampah di pesisir pantai Kelurahan Sukaraja kota Bandar Lampung sudah berjalan dan memiliki keuntungan dalam pengoperasian, hal ini terlihat dari sampah yang ada dipesisir pantai mulai berkurang. akan tetapi dalam pencapaian inovasi belum efektif dengan baik. Karena kurangnya pengawasan pemerintah maupun WALHI Lampung terhadap inovasi Bank Sampah, Standar operasional prosedur kurang jelas, kurangnya SDM yang tidak seimbang dengan sampah yang ada serta kurangnya kerjasama dengan semua element masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang di pesisir pantai Kelurahan Sukaraja kota Bandar Lampung.

Keywords: LSM, Inovasi, Kebijakan, Sampah Pantai

ABSTRACT

PARTICIPATION OF NGO'S IN SUPERVISION OF BEACH WASTE POLICY INNOVATIONS (STUDY AT WALHI, BANDAR LAMPUNG CITY)

By

REGITA MEIRENDRA PUTRI

This study aims to understand the role of NGOs in monitoring policy innovations for handling coastal waste in Bandar Lampung City. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain coastal policy innovations in waste management on the coast. The purpose of this study was to determine the role of NGOs in supervising policy innovations for handling coastal waste in Bandar Lampung City. The type of research used is descriptive qualitative research, while the data collection techniques used by researchers are interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the innovation of the waste bank program in waste management on the coast of Sukaraja Village, Bandar Lampung City has been running and has advantages in operation, this can be seen from the waste that is on the coast starting to decrease. but in achieving innovation has not been effective well. Due to the lack of supervision by the government and WALHI Lampung on the innovation of the Waste Bank, the standard operating procedures are not clear, the lack of human resources is not balanced with the existing waste and the lack of cooperation with all elements of society so as not to litter on the coast of Sukaraja Village, Bandar Lampung City.

Kata kunci: *NGO, Innovation, Policy, Beach Garbage*

**PERAN SERTA LSM DALAM PENGAWASAN INOVASI
KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH PANTAI (STUDI
DI WALHI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Oleh

REGITA MEIRENDRA PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

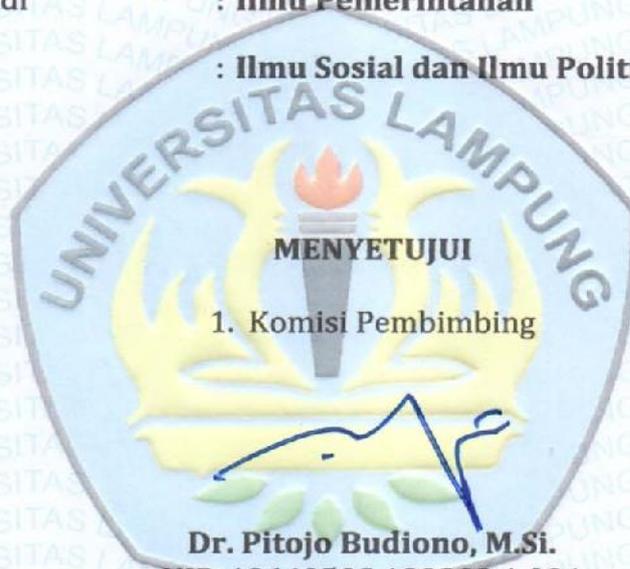
Judul Skripsi : **PERAN SERTA LSM DALAM PENGAWASAN
INOVASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH
PANTAI (Studi di Walhi Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Regita Meirendra Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616021021**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 19640508 199303 1 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Pitojo Budiono, M.Si.

Penguji : Dr. Syarief Makhya

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Two handwritten signatures are present. The top one is in blue ink and appears to be the signature of Dr. Pitojo Budiono. The bottom one is in black ink and appears to be the signature of Dr. Syarief Makhya.



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebafei acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 27 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,



Regita Meirendra Putri
NPM 1616021021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Regita Meirendra Putri, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 02 Mei 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marhendra dan Ibu Retno Yuniarti, S.Tr.Keb. Penulis mengarungi seluruh waktu dan perjalanan keilmuan di Kabupaten Lampung Selatan dan di Kota Bandar Lampung. Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Darma Wanita Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2004, dilanjutkan di Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Tri Dharma Yoga Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian Penulis melanjutkan ketingkat selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan di tahun 2013 Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 09 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur undangan SNMPTN pada tahun 2016, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2019 di bulan Januari, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari.

MOTTO

“Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’aha”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah 2:286)

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi”

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut 29:6)

“Menjadi rendah hati tak membuat seseorang berkurang, justru mengisi. Kembali ke diri yang lebih sederhana akan memberi kebijaksanaan”

(Jalaluddin Rumi)

“Tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena pada dasarnya manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri “

(Regita Meirendra Putri)

“

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Papa Ku” Terima kasih untuk doa dan semangat yang tertelah diberikan kepadaku serta kasih sayang yang selalu engkau berikan.

“Mama Ku” Terima kasih sudah melahirkanku, menyangiku serta mengasihiku dengan sangat tulus.

“Adik Ku” Terima kasih atas segala dukungan, canda tawa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Serta LSM Dalam Pengawasan Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pantai (Studi Di WALHI Kota Bandar Lampung)”**, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, semoga segala kebaikan dari Allah SWT semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya skripsi ini, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

3. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran, motivasi serta semangat tiada hentinya. Terima Kasih Penulis ucapkan kepada bapak, yang telah memberikan pelajaran yang berharga kepada Penulis untuk dapat menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi segala rintangan, sabar, memberikan semangat tiada hentinya selama ini sampai pada tahap penyelesaian skripsi. Tanpa bimbingan bapak, penulis tidak akan sampai pada tahap ini dan jasa bapak selama ini tidak akan terbalaskan, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku dosen penguji yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. Selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga dalam proses perkuliahan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

7. Segenap informan penelitian: Bapak Maryadi, Bapak Robi, Bapak Irfan dan Ibu Dian Okta Serta Pihak kelurahan Sukaraja dan para Nelayan serta warga Kelurahan Sukaraja, terkhusus bapak Maryadi selaku Ketua Nelayan Sukaraja sekaligus Ketua RT 09 Kelurahan Sukaraja. Terima Kasih bapak atas informasi dan juga data- data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah menjadi orang tua terhebat sepanjang masa, penulis sangat bersyukur telah terlahir dan di besarkan oleh orang tua seperti Mama dan Papa . Terimakasih telah membesarkan dan memberi kasih sayang tulus, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, Terimakasih kepada Papa tersayang yang selalu mendoakan penulis, selalu mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, tidak pernah lelah mengantar jemput penulis semasa sekolah dahulu dan terimakasih telah menjadi sosok imam dan tauladan untuk anak-anaknya. Untuk Mama tercinta, terimakasih selalu sabar menghadapi penulis, selalu menuruti keinginan anaknya, mama juga tiada henti mendoakan kakak dan selalu menjadi teman curhat bahkan sahabat bagi penulis serta tempat menuangkan keluh kesahan penulis. Terima kasih tiada henti dan tulus dari lubuk hati kakak atas segalanya yang tak terbalaskan ini, mungkin hanya doa yang dapat penulis berikan kepada dua orang tua terhebat ini. *I love You*, Mama Papa.
9. Adikku, terimakasih atas semangat yang diberikan kepada penulis dan selalu menghibur penulis disaat mulai lelah dengan tugas perkuliahan dan revisi skripsi ini, semoga kelak adik bisa menjadi kebanggaan Mama dan Papa

10. Nenek dan Mbah Uti yang selalu bertanya bagaimana proses dalam setiap *perskripsian* penulis. Mohon maaf jika harus membuat kalian menunggu lama untuk melihat penulis menyelesaikan perkuliahan ini, terimakasih selalu memberikan kasih sayang, memberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam mengerjakan *skripsi*, semoga kelak penulis bisa selalu membanggakan kalian.
11. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat dari SMP (ANORSS) Restu, Shafira, Stevani, Ocha, Anisah dan Nita. Terima kasih atas waktu, cerita, canda tawa, dukungan, semangat serta doanya kepada penulis. Semoga persahabatan kita selalu terjalin sampai tua nanti.
13. Sahabat dari SMA (SEKYA) : Acut, Mimin, Renata, dan Anik, yang menjadi sahabat guyonan, ngerumpi dan sahabat yang peduli disaat susah dan senang. Terimakasih telah menjadi pelepas penat, canda gurau kalian selalu membuat hari menjadi terasa lebih sejuk, keakraban yang sejak dulu semoga terus terjaga sampai kita tua nanti.
14. Sahabat Terspesial, cantik-cantiku (SIX SENSE) yang baru dipertemukan dibangku perkuliahan. Shela Pratika Sari, Mia Oktividha Andriani, Annisa Dwifani Arfi, Sindi Kapury Anggreani, dan Siti Novrija Syahfitri. Terimakasih teman-teman untuk semua yang sudah kalian berikan kepada penulis, semua canda tawa dan kesedihan sudah kita lalui bersama, dan bersama kalian lah aku tumbuh dan bisa menjadi diriku sendiri. Kalian menyadari penulis arti dari kesetiaan kawan, penulis bersyukur sekali kepada Allah SWT karena telah mempertemukan penulis dengan orang-orang seperti kalian. Terimakasih kalian selalu ada untuk penulis, di kala penulis sakit kalian tetap menemani, memberikan semangat kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga persahabatan kita terus terjalin sampai kita tua nanti, tetap jadi orang yang tulus menerima semua kekurangan dan kelebihan penulis, dan semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat ya sayang- sayangku. Terima kasih sekali lagi, *love you full*.

15. Sahabatku Sinta Apriyani, yang selalu setia mendengarkan curhatan penulis dalam segala hal, terimakasih untuk bantuan, doa, serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat
16. Sahabat AJINOMOTO : Deni, Yogi, Fifi, Nana, Nico, Angger, Panji dan Hikmawan. Berawal dari kelo mpok tugas dalam kelas perkuliahan, menjadi kelo mpok belajar dan inshaAllah menjadi sahabat. Terimakasih untuk doa, semangat dan dukungan kalian yang telah diber ikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
17. Teman-Teman Seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam masa perkuliahan dan memberikan dukungan serta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman KKN Desa Negeri Batin Kelurahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Intan, Upe, Esrul, Ridho, Yuriza, dan Ammar) Terimakasih banyak sudah menjadi keluarga kecil bahagia selama lebih dari 40 hari bersama berbagi pengalaman.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya penulis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Penulis

Regita Meirendra Putri
NPM. 1616021021

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	vii
---------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR	viii
----------------------------	------

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang <i>Civil Society</i>	10
2.2 Tinjauan Tentang Pengawasan.....	12
2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah	13
2.4 Tinjauan Tentang Organisasi Non-Profit	16
2.5 Tinjauan Tentang Sampah.....	17
2.6 Tinjauan Tentang Sistem Pengelolaan Sampah	19
2.7 Tinjauan Tentang Dampak Sampah Tidak Dikelola	24
2.8 Tinjauan Tentang Inovasi Kebijakan	26
2.9 Kerangka Pikir.....	28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Informan	32

3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Pengolahan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 WALHI.....	36
4.2 Kelurahan Sukaraja	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian	52
5.1.1 NGO Berbasis Masyarakat.....	52
5.1.2 NGO Berbasis Nasional	54
5.1.3 NGO Berbasis Internasional.....	55
5.2 Pembahasan Penelitian	57
5.3 Pengawasan Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pantai	72
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Manajemen Pengelolaan Sampah.....	19
2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah	20
3. Kerangka Pikir	29
4. Inovasi Kebijakan Jaring Sampah.....	61
5. Inovasi Kebijakan Bank Sampah.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	8
2. Tipe Sampah Berdasarkan Fasilitas, Aktifitas, Lokasi Dan Sumber.....	18
3. Pola-Pola Pengelolaan Sanitasi	22
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	48
7. Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan di Kelurahan Sukaraja	49

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesisir Bandar Lampung merupakan wilayah yang sangat potensial. Pesisir menyediakan berbagai sumberdaya seperti area vegetasi untuk fasilitas pariwisata, akses industri dan pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi flora dan fauna, tepi pantai dan mineral serta sebagai persediaan air pendingin untuk instalasi industri (Yeung (2001) dalam Fauziah, dkk. 2012:1). Sebagian aktivitas Kota Bandar Lampung berada di pesisir, meliputi pemukiman, industri, perikanan tangkap, transportasi laut, militer dan pariwisata (Wiryawan, *et. al* (2009) dalam Fauziah, dkk. 2012:1).

Sumber pencemaran berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir melalui anak sungai yang bermuara ke laut di sepanjang pesisir (Fauziah, dkk. 2012:1). Sumber lainnya mengatakan: “sampah yang menumpuk di pesisir Bandar Lampung dipengaruhi oleh delapan sungai yang bermuara ke Teluk Lampung yaitu Way Keteguhan, Way Kuripan Hilir, Way Sukamaju Hilir, Way Kunit, Way Kupang Hilir, Way Lunik Hilir, Way Galih.

“ Pada kenyataannya badan sungai dari hulu belum terjaga dengan baik sehingga sampah terbawa aliran sungai ke laut lalu menumpuk dipantai. Infrastruktur, penanganan dan peraturan juga belum dikelola dengan baik, akibatnya sampah menumpuk di pesisir”. “(hasil wawancara bersama Bapak Rahmat selaku masyarakat setempat pada hari Minggu 6 Oktober 2019).

Sampah di pesisir Bandar Lampung berdampak bagi kesehatan seperti tingginya kasus diare dan penyakit kulit, dampak terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dampak pencemaran sampah dirasakan warga Kelurahan Sukaraja. Kondisi pesisir Pantai Sukaraja yang berserakan oleh sampah dan menggenangi air laut, mulai dari plastik hingga karung bekas telah menghambat pekerjaan nelayan bahkan dengan banyaknya tumpukan sampah yang bermuara di bibir pantai nelayan harus rela untuk membawa perahunya sampai ke tengah laut walaupun nyawa mereka taruhkan demi menangkap ikan yang nantinya akan mereka jual dan belum lagi jika hasil tangkapan yang mereka dapatkan lebih banyak sampah dibandingkan ikan.

Selain itu keberadaan sampah juga membuat pendapatan nelayan menurun, kesehatan masyarakat terganggu, dan air bersih pun ikut tercemar, tidak hanya itu kehidupan ekosistem bawah laut juga terganggu. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 5 dan 6 yaitu: Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Walikota telah melihat permasalahan sampah pantai di kawasan Sukaraja tersebut sebagai masalah yang parah. yang berada di pesisir pantai Sukaraja yang sempat disinggung, sebenarnya bukanlah sampah yang berasal dari Bandar Lampung. Menurutnya sampah itu berasal dari daerah lain.

“Kami melakukan yang terbaik untuk membersihkan dan mengangkut semuanya. Masyarakat juga sudah merasakan apa yang telah dilakukan,” katanya usai melantik anggota DPRD terpilih, Senin (19/8). Menurutnya, peraturan daerah terkait pengelolaan sampah sudah ada. Namun dirinya mengaku tidak ingin membuat

peraturan dengan sanksi hingga pemenjaraan. “Saya tidak ingin dipenjara atau didenda. Harus ada kesadaran masyarakat” ujarnya. (Sumber:<https://radarlampung.co.id/2019/08/20/gubernur-singgung-sampa-herman-h-n-kita-sudah-sekuat-tenaga/>. Diakses 20 November 2019 jam 19.30 WIB)

Selain itu menurut Wakil Gubernur Ibu Chusnunia dalam dialognya bersama Nelayan Sukaraja di tengah hamparan sampah yang berada di pesisir Sukaraja Kota Bandar Lampung yaitu:

“Nunik menyatakan bahwa ingin menjadikan pesisir Pantai Sukaraja sebagai tempat wisata yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Namun dirinya akan menindaklanjuti hasil tinjauan ke pesisir Pantai Sukaraja tersebut. Terlebih, salah satu nelayan yang diajaknya berdiskusi mengaku sampah akan terus datang dan berasal dari sungai yang arusnya berujung ke Pantai Sukaraja, Nunik pun mengaku ke depan pihaknya akan membicarakan persoalan ini juga dengan Pemkot Bandar Lampung. Di mana bagian Pemkot Dan Pemprov akan dibahas sesuai tanggung jawabnya”. (Sumber: <https://radarlampung.co.id/2019/06/18/nunik-ingin-sulap-pesisir-sukaraja-jadi-tempat-wisata/> Diakses pada hari rabu 20 November 2019 jam 20.22 WIB).

Apa yang direncanakan oleh Ibu Nunik selaku Wakil Gubernur Provinsi Lampung, bahwasannya rencana pembuatan tempat wisata di lahan pesisir Pantai Sukaraja telah santar beredar sejak tahun 2016 yang nyatanya hanya menjadi isapan jempol saja hingga saat ini, dan tidak pernah terealisasi. Kelurahan Sukaraja merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki penduduk yang dapat dikategorikan padat dengan jumlah 12.081 orang sehingga sampah yang dihasilkan juga banyak (Profil Kelurahan Sukaraja). Sampah pantai menjadi perhatian masyarakat khususnya para Nelayan, sebab pemukiman nelayan berada tak jauh dari Pantai Sukaraja, Sehingga target dari kegiatan ini adalah menata wilayah pesisir agar bersih dan sehat serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir.

Tingginya timbunan sampah padat di area pantai Sukaraja tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk membuang sampah di pantai, hal tersebut karena kurangnya pengelolaan sampah di area tersebut, dimana petugas kebersihan tidak mengambil sampah yang dikumpulkan setiap hari, serta adanya sistem iuran yang ditetapkan pada masyarakat yang sampahnya diangkut oleh Satuan Operasi Kebersihan Lingkungan (SOKLI).

Ketua RT 009 Kelurahan Sukaraja menyatakan bahwa memang tidak ada petugas sampah atau *truck* sampah yang mengangkut sampah-sampah pantai tersebut, bahkan dari LSM tidak ada yang pernah datang untuk melihat dan berencana untuk membersihkan sampah-sampah tersebut, sehingga sampah yang ada hanya dibiarkan tersapu oleh ombak laut yang kemudian kembali lagi ketepian pantai. Beliau pun mengatakan bahwa pernah ada pengangkutan sampah namun itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu pada saat adanya acara kedinasan atau kelingkungan.

“Sampah yang diangkut petugas sampah dan truk sampah merupakan sampah rumah tangga yang menumpuk di TPS Sukaraja, karena sampah rumah tangga tidak hanya berasal dari Sukaraja tetapi juga dari desa Garuntang dan Bumi Raya.”. (Hasil wawancara dengan Ibu Dian Oktafia selaku Ketua RT 009 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung pada hari Senin 23 September 2020).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas proses pemindahan sampah mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh truk pengangkut sampah yang sudah usang dan bocor dibagian belakang, sehingga sering kali menyebabkan sampah dan cairan sampah yang diangkut tersebar di sekitar rute perjalanan. Jika pengangkutan sampah mengalami keterlambatan, maka sampah akan menumpuk di TPS, dan menjadikan keindahan kota terganggu dan bau yang ditimbulkan akan mengganggu

pernafasan. Masalah lain yang kemudian muncul terkait pelayanan yang belum diberikan dengan semestinya adalah pelayanan SOKLI yang kurang efektif, karena persoalan renumerasi dan terbatasnya jumlah kontainer penampungan sampah. Masyarakat Pesisir Sukaraja masih merasa pemerintah kurang tanggap atas segala keluhan.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pengelolaan sampah di kota ini menjadi persoalan serius untuk segera diselesaikan. Pertama, dari aspek kebijakan, ratusan ton sampah yang tersisa setiap hari karena tidak bisa diangkut oleh unit pelayanan kebersihan membuktikan bahwa kebijakan pengelolaan di kota ini tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan permasalahan bisa terjadi pada proses perumusan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak atau kurang menyentuh permasalahan yang sebenarnya, atau bisa juga permasalahan terjadi pada implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi yang komprehensif untuk mencari akar persoalan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini.

Kedua, dari aspek manfaat yang dirasakan masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah yang baik beserta implementasinya akan mendukung upaya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat dimana masyarakat bisa tinggal secara nyaman. Kebijakan yang bisa menciptakan lingkungan seperti itu berarti bisa menciptakan nilai kepada masyarakat (*public value*), yaitu sesuatu yang bisa menambah nilai terhadap lingkungan publik dan juga warganya (Benington, 2011). Sebagaimana dikemukakan oleh Moore (2015) bahwa nilai publik muncul ketika warga masyarakat merasa lebih baik untuk tinggal di kota yang bersih sebagai hasil dari kebijakan pemerintahnya, daripada tinggal di lingkungan yang kotor.

Ketiga, dari aspek pelaksanaan inovasi kebijakan dalam hal penanganan sampah di Kelurahan Sukaraja dari awal pengelolaan pembuangan sampah saja tidak ada keterbaruan sistem karena memakai sistem lama yang berdampak menumpuknya sampah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Lampung menyatakan bahwa penanganan sampah di pesisir Kota Bandar Lampung harus diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan selama ini hanya pengerukan sampah dari laut ke dasar, namun bukanlah penyelesaian yang efektif bagi Teluk Lampung. Adanya inovasi kebijakan Pemasangan jaring di titik-titik tertentu seperti muara serta mulut sungai dapat dilakukan untuk meminimalkan sampah darihulu ke pesisir sampai saat ini hanya perencanaan dari pemerintah dan tidak dilakukan.

Pengelolaan sampah juga telah menjadi perhatian nasional sehingga pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaansampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Penanganan masalah sampah di pesisir Teluk Lampung, harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama antara instansi terkait, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan bermuara ke laut.

Penanganan sampah mesti masuk dalam rencana program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota setiap tahunnya mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan pihak terkait pada aliran sungai yang bermuara ke laut. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Topik
1.	Ella Hasturi Rayaningsih (2018). Jurnal Universitas Muhammadiyah Makkasar	Inovasi Program Pattasaki Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Makassar	Penelitian Ini Untuk Menganalisis Inovasi Program Pattasaki Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Makassar
2.	Sri Darwati (2019). Artikel Pemakalah Pararel PUPR	Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai	Penelitian Ini Untuk Menganalisis Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai
3.	Gledys Deyana Wahyudin, Arie Afriansyah (2020). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan	Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional	Penelitian Ini Untuk Menganalisis Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional

Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

Peneliti pertama fokus penelitiannya mengkaji tentang mencoba mengambarkan dan menjelaskan inovasi Pattasaki dalam pengelolaan sampah di pesisir pantai dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program pattasa'ki dalam pengelolaan sampah di pesisir pantai kota Makassar sudah berjalan dan memiliki keuntungan dalam pengoperasian, hal ini terlihat dari sampah yang ada dipesisir pantai mulai berkurang. akan tetapi dalam pencapaian inovasi belum efektif dengan baik.

Peneliti kedua Penelitian Ini mengkaji tentang Menganalisis Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai fokus penelitiannya dan Hasil sampling sampah di Pulau Untung Jawa pada hari kerja adalah sebesar 5,06 m³/hari dan

pada akhir pekan sebesar 5,79 m³/hari. Sementara timbulan sampah bawaan laut dengan rata – rata timbulan sampah bawaan laut adalah 7,67 m³/hari. Sampah di daratan didominasi sampah organik (47-66) %. sedangkan sampah bawaan umumnya didominasi an organik 64,74%. Peneliti ketiga Penelitian Ini mengkaji tentang Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Dan hasil penelitian regulasi pencemaran sampah di laut berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan pengurangan tidak berjalan optimal dalam regulasi sampah.

Pengelolaan sampah yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kondisi ini akan semakin parah apabila daya respon pemerintah terhadap penanganan sampah tidak diimbangi dengan pelayanan dan penanganan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini masih sangat lemah untuk merespon dengan cepat permasalahan sampah di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan maka peneliti ingin membahas Peran serta LSM dalam Pengawasan Inovasi kebijakan Penanganan sampah pantai di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan konsep yang digunakan untuk memahami proses kebijakan oleh aktor-aktor yang terlibat atau peran serta dalam proses pembentukan kebijakan dalam rangka menyelesaikan alternatif permasalahan secara terus menerus dilakukan dan yang nyatanya tidak pernah selesai. Maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “Peran serta LSM dalam Pengawasan Inovasi kebijakan Penanganan Sampah Pantai di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran serta LSM dalam Pengawasan Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pantai?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Peran serta LSM dalam Pengawasan Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pantai.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang inovasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah pantai dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah sebagai penyelenggara dalam membuat kebijakan sesuai dengan kondisi di Kampung Nelayan Payang sehingga dapat mengelola sampah pantai dengan optimal

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Civil Society

Dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern (Suwarni,2011:55).

Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani (Mochamad Parmudi.,2015:298). Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Makna lain bagi istilah *civil society* yaitu adanya penekanan pada ruang (*space*) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami *civil society* sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan social dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat (Suryanto, 2018 :125).

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto : 2018), dijelaskan bahwa *Civil society* sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik, melalui berbagai ide, inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. ketiga, golongan arus bawah, mereka lah yang kelak menjadi sumber kekuatan, sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi, dibutuhkan juga *public sphere* atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun NGO.

Dapat dikatakan bahwa *civil society* merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan

sosial yang ada dan bersifat independen terhadap Negara. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Wujud lain dari *civil society* ini seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainn

2.2. Tinjauan Tentang Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilakukan oleh pemimpin dalam agenda mencapai tujuan suatu organisasi. Fungsi fungsi yang ada pada manajemen diantaranya fungsi pelaksanaan, perencanaan, dan fungsi pengawasan menurut Griffin (2004:44).

Menurut Schermerhon (dalam Erni dan Saefullah, 2005:317) mendefinisikan pengawasan adalah sebagai proses menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang bisa menjadi faktor pendukung untuk mencapai target yang sesuai dengan harapan. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan kinerja yang dilakukan karyawan berdasarkan standar untuk pengukuran kinerja, memantapkan kualitas atas nilai kerja dan pengambilan informasi untuk menjadi tolak ukur dalam pengambilan umpan balik atas hasil pencaipan yang akan dikomunikasikan kepada para karyawan

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memeriksa kegiatan perusahaan untuk menjamin tercapainya tujuan yang sesuai dengan rencana perusahaan. Serta untuk mengevaluasi setiap kegiatan untuk segera melakukan perbaikan apabila ada kesalahan kesalahan sebelumnya, pengawasan juga sangat efektif dilakukan untuk mebantu usaha tercapainya pekerjaan yang baik.

Dalam pengawasan ini peneliti akan menganalisis prinsip-prinsip manajemen dalam Peran serta LSM dalam Pengawasan Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pantai dengan menggunakan pengawasan Internal dan Eksternal dan juga menganalisis tentang organisasi Non- Profit meliputi :

- a. Berbasis masyarakat
- b. Berbasis Nasional
- c. Berbasis Internasional

2.3. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka (2) UU Nomor 32 tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945. Daerah otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Diberikannya hak dan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi menyebabkan badan-badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturanperaturan daerah yangtidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan- perundangan yang lebih tinggi dan mampu menjalankan penyelenggaraan kepentingan umum.

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang- undang Nomor 4 tahun 1974, Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 dan terakhir dicabut dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan mengalami perubahandengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Diundangkannya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah sebagai manifestasi dariotonomi daerah. Secara teoretis ada enam elemen utama yang membentuk pemerintahan daerah (Suwandi, 2002 : 6) yaitu :

- a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;
- c. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan;
- d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
- e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Adanya manajemen pelayanan umum (*public service*) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Keenam elemen di atas secara integrated merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintahan daerah. Untuk itu maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pelaksanaan yang pada akhirnya akan memerlukan pengawasan sebagai kontrol. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu bertindak secara efisien, ekonomis, efektif dan akuntabel. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut adalah Inspektorat sebagai lembaga pengawasan.

2.4. Tinjauan Tentang Organisasi *Non-Profit*

Organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter) (Komang, 2008). Karakter dan tujuan dari organisasi *non-profit* menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi *non-profit* berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi *non-profit* menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia (Komang, 2008).

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari organisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi terhadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh (Komang, 2008:53).

Menurut Sapto (2009:27), organisasi nirlaba dapat didefinisikan secara hukum sebagai organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset atau pendapatannya untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau

pemimpinnya. Akan tetapi dibalik pembatasan yang demikian, terdapat beberapa kelonggaran. Yang pertama adalah organisasi nirlaba tidak dilarang untuk memberikan kompensasi untuk pekerjanya sebagai imbal balik atas kinerja yang diberikan. Yang kedua adalah organisasi nirlaba tidak dilarang untuk mencari keuntungan, akan tetapi sekali lagi bukan untuk didistribusikan melainkan untuk pendanaan Proyek lainnya.

Keuntungan lainnya adalah organisasi nirlaba tidak dikenai pajak. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang menuntut manajemennya untuk mampu memberikan program dan pelayanan kepada publik sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh para penyandang dana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi nirlaba sangat tergantung kepada penyandang dana dan memberikan pelaporan kepada para pelaporan kepada penyandang dana tersebut.

2.5. Tinjauan Tentang Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006; 11). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Manik (2003: 67) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan,

tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna.

Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003: 72)

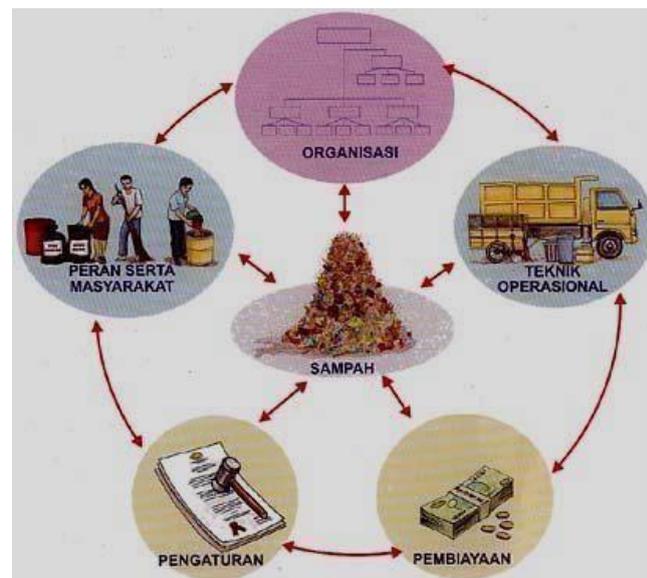
Tabel 2. Tipe Sampah Berdasarkan Fasilitas, Aktifitas, Lokasi Dan Sumber Sampah

SUMBER	FASILITAS,AKTIFITAS DAN LOKASI	TIPE SAMPAH
Pemukiman	Tempat tinggal satu keluargadan banyak, apartemen kecil, sedangdan besar	Sampah makanan, sampah kering, sampah debu dan sampah khusus
Komersial	Toko, restoran, pasar, kantor,hotel, motel, bengkel, fasilitas kesehatan.	Sampah makanan, sampah kering, debu dan sampah berbahaya
Perkotaan	Gabungan tempat tinggal dan komersial	Sampah gabungan yang berasal dari pemukiman dan komersial
Industri	Konstruksi, pabrik, kimia, penyulingan	Barang industri rumah tangga, sisa pengepakan, sisa makanan, industrikonstruksi,
Ruang Terbuka	Jalan, taman, ruang bermain, pantai, tempat rekreasi, lorong, tanah kosong	Sampah khusus dan sampah kering
Lokasi	Air bersih, air limbah, proses pengolahan industri.	Limbah pengolahan,
Pengolahan		buangan endapan

Sumber : Tchobanoglous (2007:52)

2.6. Tinjauan Tentang Sistem Pengelolaan Sampah

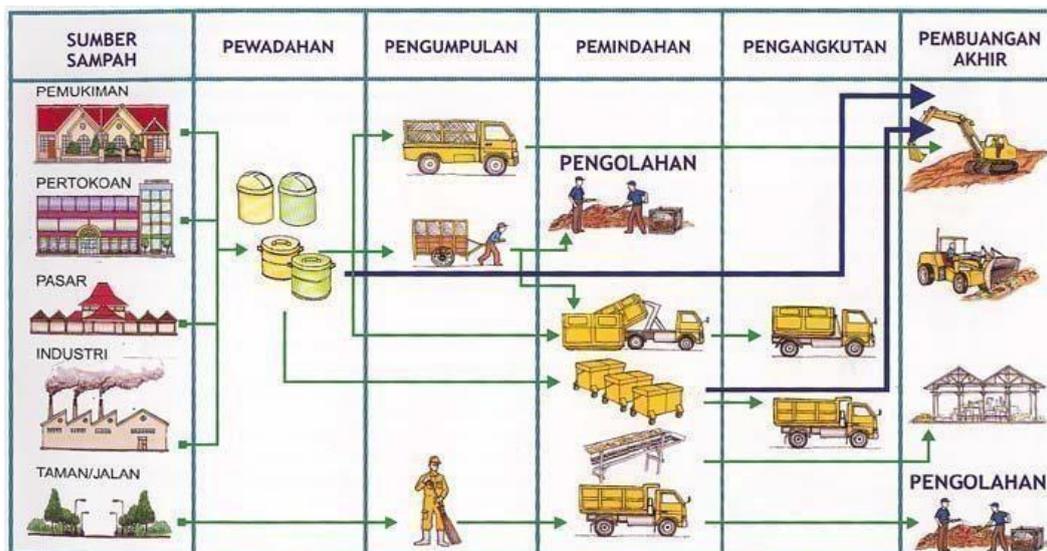
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.



Gambar. 1
Skema Manajemen Pengelolaan Sampah
 (Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002)).

1. Aspek Teknik Operasional

Aspek Teknik Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (2008:6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu penampungan atau pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.



Gambar 2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Sumber: Standar Nasional Indonesia(SNI 19-2454-2002))

2. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang

peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko 2002: 29). Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI19-2454- 2002).

3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi (Dit.Jend. Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003). Menurut SNI – T-12-2001-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Biaya pengumpulan 20 - 40 %
- b. Biaya pengangkutan 40 % - 60 %
- c. Biaya pembuangan akhir 10% - 30 %

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal ± 10 % dari APBD. Besarnya retribusi

sampah didasarkan pada biaya operasional pengelolaan sampah (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003). Di Indonesia, besar retribusi yang dapat ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya $\pm 0,5\%$ dan maksimum 1% dari penghasilan per rumah tangga per bulan (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003).

Tabel 3. Pola-Pola Pengelolaan Sanitasi

Investasi	Pola 1	Pola 2	Pola 3	Pola 4	Pola 5
Lahan	Pemda	Pemda	Pemda	Masyarakat Pemilik	Masyarakat
Bangunan	Pemerintah	Pemerintah dan	Masyarakat	Swasta	Pemerintah
Perpipaan	Pemda	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat
Pengelolaan	Masyarakat bersama	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat

**Sumber: Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,
Dep.Kimpraswil (2003)**

4. Aspek Peraturan/ Hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Hartoyo, 2008: 8):

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan (LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003). Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

6. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban. Seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan

dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya (AmranSyah, 2012: 20). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melauai pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya.

2.7. Dampak Sampah Tidak Dikelola

Menurut Gelbert dkk (2006: 46), jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

1. Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut (Gelbert dkk2006: 46):

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah yang dikelola tidak tepat dapat bercampur air minum.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah
- d. Sampah beracun, telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis (Gelbert dkk., 2006: 47). Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak (Gelbert dkk., 2006: 47).

3. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut menurut Gelbert dkk (2006: 47) adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau

yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

2.8. Tinjauan Tentang Inovasi Kebijakan

United Nations Departement of Economic And Social Affairs (2006) memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya Inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah khususnya dibidang pelayanan dan pada saat ini berlangsung diberbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi administrasi publik. Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan "pengetahuan baru" yang dapat diakses oleh negara-negara diseluruh dunia. (<http://www.unpan.org/innovme.com> diakses pada 30 November 2020 pukul 15.00 WIB)

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 2003:4), inovasi kebijakan menurut Walker adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya. Benyamin Abdurahman (2014: 70) mengemukakan pertanyaan tentang ada apa dengan regulasi dan kebijakan kerjasama daerah selama ini? Produk hukum dan kebijakan pasca reformasi memberikan berbagai pembelajaran pembangunan daerah dan sekaligus menyisakan masalah yang belum terselesaikan.

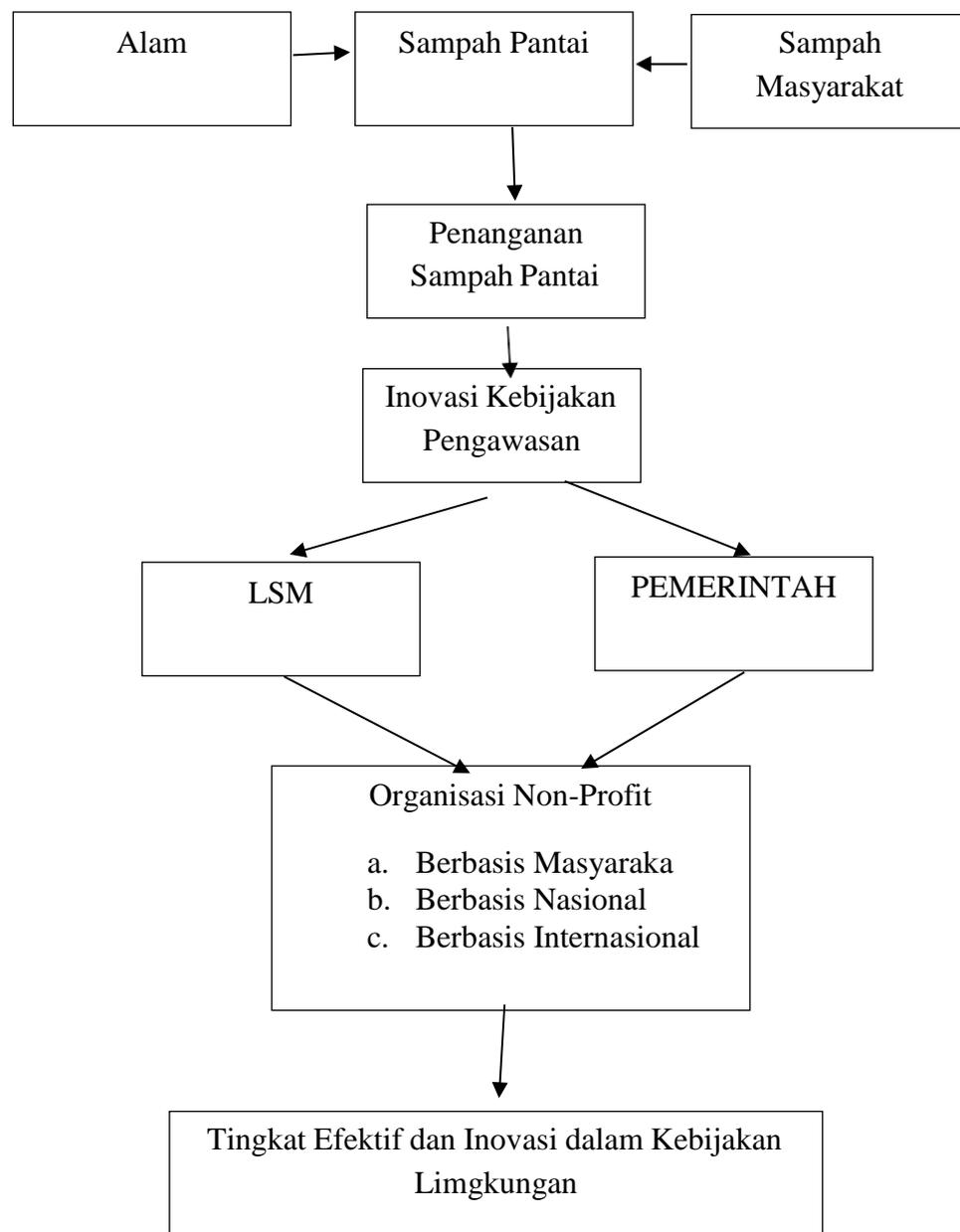
Melekat dengan pembangunan daerah, timbul berbagai implikasi pelaksanaan otda, seperti kegagalan daerah otonom baru, meruncingnya gesekan kepentingan antar daerah" (baca: ego daerah), permasalahan egosektoral, miskordinasi, hingga *mismanagement* (salah urus) di daerah. Pada sisi lain, inovasi daerah dalam rangka menyiasati dan meredakan berbagai implikasi otonomi daerah melalui berbagai bentuk (*aliansi*) kerja sama antar daerah kewilayahan secara dramatis dalam bingkai regulasi dan kebijakan. Kondisi tersebut terjadi karena kelemahan pada konsep dasar yang *ambivalen*, dan *misleading* terhadap esensi dari pengembangan serta pembangunan wilayah itu sendiri.

Dalam Inovasi Kebijakan Penanganan Sampah Pemerintah mempunyai program Pemerintah seperti jaring-jaring sampah yang dalam pelaksanaannya LSM WALHI ikut mengelola dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Jaring Penangkap Sampah" berfungsi menangkap sampah yang terbawa arus air dan mencegahnya untuk menuju ke lautan. sebuah jaring ditempatkan pada bangunan mirip bendungan yang atasnya dapat di fungsikan sebagai jembatan. Jaring yang dipasang akan menangkap sampah yang hanyut terbawa aliran sungai. Cukup mudah namun beberapa komunitas lingkungan sedikit

meragukan efektifitas dari Jaring tersebut. Ikan-ikan yang berenang dan bermigrasi dapat dapat ikut terjebak dalam jaring tersebut dan akan mati. Namun terlepas dari semua itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan jaring dalam mencegah dan mengurangi sampah yang terhanyut memanglah sangat mengesankan.

2.9. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing- masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara menggambarkan dan mengelola data serta informasi berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dilapangan lalu untuk lebih lanjutnya akan dilakukan analisis. Metode ini tidak hanya sebatas mengumpulkan data, melainkan dilakukan analisis, penyajian informasi dan data digambarkan kedalam bentuk sebuah kalimat yang mudah dipahami serta bermakna bagi pembaca.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2017:4) mengatakan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan output data deskriptif yang berbentuk tulisan atau lisan dari orang orang atau objek yang diteliti. Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dikarenakan yang sifatnya tidak mengukur ataupun mengakumulasi fakta dengan angka, melainkan menerjemahkan fenomena penelitian dengan cara mengungkapkan kejadian peristiwa secara nyata dengan apa yang didapatkan dilapangan.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017:94) ada dua rumusan masalah yang ingin dicapai oleh peneliti dengan memanfaatkan fokus. Pertama, fokus dapat membatasi penelitian agar tidak keluar dari studi, kedua penetapan fokus yang berguna untuk

memenuhi kriteria keluar masuknya informasi yang didapatkan di lapangan. Sehingga penelitian ini fokus terhadap apa yang menjadi tujuan penelitian. Maka fokus penelitian ini adalah mengetahui Peran LSM dalam pengawasan inovasi kebijakan penanganan sampah pantai yang dikelola WALHI Kota Bandar Lampung:

1. **Organisasi berbasis masyarakat** – yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit;
2. **Organisasi Nasional** – yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang, dan;
3. **Organisasi Internasional** – yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua tempat yaitu:

- a. WALHI (LSM) Kota Bandar Lampung
- b. Pantai Sukaraja, dimana terdapat beberapa pedagang ikan yang menjual dagangannya dari nelayan payangan. Sementara itu, kondisi pantai penuh dengan tumpukan sampah dan laut sudah tercemar oleh sampah-sampah. Selain itu, Sukaraja merupakan salah satu pesisir pantai Bandar Lampung yang menjadi binaan WALHI (LSM) dalam menangani sampah.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

3.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2003:) data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan bukan angka dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian di analisis dalam bentuk kategori Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1.1.1. Data Primer

Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (lapangan dan informan) yang memiliki informasi atas data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian.

1.1.2. Data Sekunder

Menurut Sarwono (2006:209) “data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan” Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah (1) Data bentuk teks meliputi dokumen, surat-surat. (2) Data bentuk gambar meliputi foto, (3) Data bentuk suara meliputi hasil rekaman dll.

3.5. Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran dari Penanganan Sampah Pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur WALHI Kota Bandar Lampung
2. Ketua RT 09 Sukaraja
3. Warga RT 05, RT 09, RT 10, Sukaraja
4. Kasubbag (Kepala Subbagian) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, saya menggunakan wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*). Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan. Pewawancara yang akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Urutan pertanyaan, seberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan.

2. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2010:143) “dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan”. Peneliti menggunakan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk dijadikan data yang kuat untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Sumber resmi merupakan dokumen yang

dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan WALHI Kota Bandar Lampung.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan
2. Interpretasi pada tahapan ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu:

1. **Reduksi Data**, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247).
2. **Penyajian Data**, Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249).
3. **Verifikasi Data**, Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah WALHI

A. Sejarah WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI adalah lembaga dengan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan, serta pendampingan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerakan lingkungan hidup untuk meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah atau negara, dan lingkungan hidup. Didirikan di Jakarta 19 Desember 1989, WALHI merupakan LSM atau lembaga yang memberdayakan masyarakat. `jika diibaratkan sebuah negara maka WALHI telah mencoba untuk menjadi miniatur sebuah negara, setidaknya jika dilihat dari konstitusi yang dimilikinya.

Saat ini didalam tubuh WALHI terdapat dua kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sudah cukup jelas diatur di dalam Statuta maupun dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS). Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Eksekutif Nasional, Eksekutif Daerah dan Anggota-anggota, sedangkan kekuasaan legislatif yang lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Nasional dan Dewan Daerah.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda- agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo- liberalism), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara- negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalis menglobal menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Di tengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. WALHI memastikan dirinya menjadi bagian utama dari gerakan ini. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional (FOE) yang beranggotakan 71

organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

B. Nilai-Nilai Dasar WALHI

- a. Menghormati HAM
- b. Demokratis
- c. Keadilan gender
- d. Keadilan Ekologis
- e. Keadilan Antar Generasi
- f. Persaudaraan social
- g. Anti kekerasan
- h. Keberagaman

C. Prinsip-Prinsip WALHI

a. Keterbukaan;

Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.

b. Keswadayaan;

Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.

c. Profesional;

Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semupihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.

d. Ketauladanan;

Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.

e. Kesukarelawanan;

Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring.

4.2. Sejarah WALHI Lampung

Cikal bakal berdirinya walhi lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se- Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di

Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pencinta alam Lampung yang dipelopori oleh Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi Lampung.

Dari kesepakatan kelompok pencinta alam yang memelopori kegiatan-kegiatan lingkungan hidup untuk mendirikan gerakan baru yang bernama Walhi Lampung tepat didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991 secara resmi Forda Walhi Lampung terbentuk dengan formasi kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Daerah yang beranggotakan tiga orang yaitu Sentot (Putra Rimba) Bandar Lampung, Alhm. Gunawan ZL (Wanacala) Bandar Lampung, dan Muh (LPMD) Lampung Selatan sedangkan pada presidium Walhi Lampung adalah Kusworo (Watala) Bandar Lampung. Anggota Forda Walhi Lampung terdiri dari Watala (Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Putra Rimba (Bandar Lampung), LPMD (Lampung Selatan), LBH Bandar Lampung, PKBI (Bandar Lampung). Keanggotaan Forda Walhi Lampung yang masih terbatas menjadikan gerakan-gerakan Forda Walhi Lampung terfokus pada persoalan lingkungan, kasus pada waktu itu Forda Lampung melakukan advokasi penolakan pembangunan PLTA Batu Tegi di Lampung Selatan saat ini menjadi Tanggamus.

Pada tahun 1992 PNLH V di Sudiang yang dihadiri oleh KKD diwakili oleh Alhm. Gunawan ZL dan Forda Walhi Lampung dihadiri oleh Kusworo sebagai Presidium serta anggota Korda Walhi Lampung. Pasca PNLH V di Sudiang 1992 keanggotaan Forda Walhi Lampung mulai ditertibkan yang tercatat dan terdaftar adalah 6 anggota yaitu Watala (Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Yasadhana (Pringsewu), Putra Rimba (Bandar Lampung), PKBI (Bandar Lampung), dan LBH

Bandarlampung,. Ada beberapa lembaga yang tidak masuk atau menjadi anggota Forda Walhi Lampung Yaitu LPMD dengan alasan ketidakaktifan Lembaga tersebut dalam kegiatan-kegiatan Forda Walhi Lampung.

Pada tahun 1996 Korda Walhi Lampung melaksanakan PDLH I sekaligus sebagai saksi terbentuknya secara definitif keberadaan WALHI Lampung dengan terpilihnya Guswarman dari Mitra Bentala, pada PDLH I Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka. Pada waktu PDLH I Korda Walhi Lampung ini berganti menjadi Badan Eksekutif Daerah Walhi Lampung yang di pimpin oleh direktur Eksekutif yaitu Guswarman (mitra Bentala), Dewan Daerah Dedi Mawardi (LBH Bandarlampung), Heri (Yasadhana), Gunawan ZL (Wanacala). Kegiatan advokasi pada waktu itu adalah penolakan pembuatan pembangkit Listrik Tenaga Air batutegei, karena secara ekologi merusak tatanan penyimpanan air dengan mengorbankan bukit-bukit yang ada di sekitarnya.

Perjalanan forum walhi Lampung terlalu eksis dalam memyuarakan perjuangan terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Lampung tepat Pada tahun 1999 Forum Walhi Lampung mengadakan PDLH II dengan terpilihnya Masyuri dari Kantor Bantuan Hukum, pada PDLH II Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 12 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB, Elsapa, KBH Bandarlampung dan Mainaka.

Dalam perjalanannya kepemimpinan Masyuri mengalami persoalan sehingga Pada Tahun 2001, Forum Walhi Lampung karena desakan Delapan Anggota forum untuk mengadakan PDLH Luar Biasa disebabkan Kebijakan Masyuri pada waktu itu mengakibatkan ketidakpercayaan Anggota Forum, dari hasil PDLH Luar Biasa terpilihlah Mukri Friatna dari Wanacala untuk Masyuri, namun secara keorganisasian Masyuri masih syah menjadi pimpinan Walhi Lampung Pada saat itu, sehingga Walhi Lampung terjadinya dualisme kepemimpinan yaitu Mukri Friatna pimpinan Hasil PDLH Luar Biasa sedangkan Masyuri Pimpinan terpilih pada waktu PDLH II yang tdaik mengakui adanya PDLH Luar Biasa.

Pasca PNLH tahun 2003 di Medan penyelesaian dualisme kepemimpinan Walhi Lampung di selesaikan dengan hadirnya Direktur Eksekutif Nasional Walhi Longgena Ginting untuk pembekuan kedua pimpinan Walhi Lampung Mukri Friatna dan Masyuri, kemudian pemilihan ulang dan hasil dari pemilihan tersebut terpilihlah Mukri Friatna sebagai Direktur Eksekutif Walhi Lampung untuk masa periode 2003 – 2006.

1. Visi Misi WALHI Lampung

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- b. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
- c. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
- d. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
- e. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

2. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kesadaran hukum dari berbagai elemen masyarakat serta penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola Sumber Daya Alam & lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan
- b. Adanya kebijakan penataan ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagai bagian dari adaptasi, mitigasi bencana ekologis dan perubahan iklim.
- c. Adanya pengakuan dan jaminan kepastian pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis masyarakat melalui konsep Wilayah Keloka Rakyat.
- d. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi WALHI Lampung Yang Baik dan Akuntabel.

3. Anggota WALHI Lampung

Sebagai organisasi forum WALHI Lampung memiliki Organisasi dan 1 Orang Anggota Individu dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggota Lembaga

- 1) LBH Bandar Lampung
- 2) PBHI Lampung
- 3) KBH Lampung
- 4) Mitra Bentala
- 5) WANACALA
- 6) Kawan Tani
- 7) SP Sebay Lampung
- 8) Yasadhana
- 9) ELSAPA
- 10) PKBI Lampung
- 11) Masapala AKL
- 12) Matala Lampung
- 13) Poltapala Polinela
- 14) Mapala Ardenaswari

b. Anggota Individu

Ir. Edison, M.PAf., IPM.

4. Pengurus WALHI Lampung

Dalam melaksanakan kerja Advokasi Lingkungan Hidup dan pelaksanaan program WALHI Lampung dilaksanakan oleh pengurus harian yang disebut Eksekutif Daerah dengan pengawasan dan koordinasi bersama Dewan Daerah.

- a. **Dewan Daerah** a. Armayanti Sanusi, S.I.Kom. (Ketua) b. Dellys Ari Saputra, S.Sos. (Anggota) c. Chandar Bangkit Saputra, SH. (Anggota)

b. Eksekutif Daerah

- Direktur : Irfan Tri Musri
- Kepala Divisi Penguatan Organisasi : Iqbal Pandji Putra
- Staf Database & Manajemen Aset : Irawan Pratama Putra
- Kepala Rumah Tangga : Mulyadi Sofiyan
- Kepala Divisi Program Monitoring & Evaluasi : Hertanto Andanawarih
- Staf Administrasi Program : Siti Nur Asiah
- Staf Pelaksana Program : Alvin Alyonni
- Kepala Divisi Advokasi & Kampanye : Edi Santoso
- Kepala Divisi Administrasi & Keuangan: Iksan Kurniadi

5. Program & Advokasi

Adapun program yang dilaksanakan WALHI Lampung selama periode 2015 – 2019 ialah Mendorong pengakuan pemerintah atas akses Sumber Daya Alam kepada Masyarakat Lokal di Kawasan Hutan Konservasi Tahura Wan Abdul Rahman Register 19 Gunung Betung Kabupaten Pesawaran dan Kawasan Hutan Lindung Register 3 Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan

B. Kelurahan Sukaraja

1. Gambaran Umum Kelurahan Sukaraja

Kelurahan Sukaraja merupakan bagian wilayah Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Sebelumnya Kelurahan Sukaraja berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Akan tetapi, tahun 2012 terjadi pemekaran sehingga Kelurahan Sukaraja berada di Kecamatan Bumi Waras dengan luas 80,3 ha/m². Wilayah Sukaraja memiliki daerah pantai 5 ha. Di samping itu, Kelurahan Sukaraja terdiri dari dua lingkungan. Kedua lingkungan ini dipisahkan dengan Jalan Yos Sudarso. Lingkungan I berada di daerah pantai terdiri dari 17 Rukun Tetangga (RT), sedangkan lingkungan II terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT) (Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019). Secara administratif, Kelurahan Sukaraja memiliki batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Garuntang - Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung - Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Way Lunik - Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi Waras (Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019)

2. Kependudukan

Di dalam Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019 jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di Kelurahan Sukaraja sebanyak 3.177 KK. Adapun distribusi penduduk Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	5.690	47,09%
2	Perempuan	6.931	52,91%
	Jumlah	12.081	100%

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sukaraja adalah 12.081 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 5.690 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 6.931 jiwa. Penduduk di Kelurahan Sukaraja didominasi oleh penduduk perempuan 52,91%. Penduduk laki-laki tidak berbeda jauh jumlahnya dengan penduduk perempuan yaitu 47,09%. b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	191	171	367	3.03
2	TK	459	558	1017	8.41
3	SD/Sederajat	1.132	2.175	3.307	27.37
4	SMP/Sederajat	1.583	1.740	3.323	27.50
5	SMA/Sederajat	2.056	2.027	4.083	33.79
6	DI/Sederajat	83	80	163	1.34
7	D2/Sederajat	75	88	163	1.34
8	D3/Sederajat	12	10	22	0.18
9	SI	92	81	173	1.43
10	S2	2	1	3	0.02
	Jumlah	5.690	6.931	12.081	100

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4.083 penduduk Sukaraja mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA/ sederajat. Sementara, tingkat pendidikan S2 hanya berjumlah 3 jiwa. Penduduk perempuan banyak berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2.175 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki banyak berpendidikan sampai tingkat SMA/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan penduduk Sukaraja masih rendah.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Buruh Tani	231	31	262	2.84
2	Buruh Migran	1.193	3.632	4.825	52.37
3	Pegawai Negeri Sipil	53	27	80	0.86
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	-	25	25	0.27
5	Pedagang Keliling	60	189	249	2.70
6	Nelayan	1.950	-	1.952	21.16
7	Montir	10	-	10	0.10
8	Dokter Swasta	-	2	2	0.02
9	Bidan Swasta	-	4	4	0.04
10	Perawat Swasta	1	3	4	0.04
11	Pembantu Rumah Tangga	57	325	382	4.14
12	TNI	2	-	2	0.02
13	POLRI	7	-	7	0.07
14	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	125	14	139	1.50
15	Pengusaha Kecil dan Menengah	40	339	379	4.11
16	Jasa Pengobatan Alternatif	2	-	2	0.02
17	Karyawan Perusahaan Swasta	449	322	771	8.36
18	Karyawan Perusahaan Pemerintah	50	70	120	1.30
	Jumlah	4.231	4.982	9.213	100

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 9.213 penduduk Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras adalah pekerja. Penduduk perempuan yang bekerja berjumlah 4.982 jiwa dan penduduk laki-laki yang bekerja berjumlah 4.231 jiwa. Buruh migran menjadi pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk perempuan di Sukaraja. Sementara itu, penduduk laki-laki paling banyak bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Sukaraja memiliki kegiatan atau aktivitas sehari-harinya sehingga untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah itu sulit dilakukan karena faktor pengetahuan dan ekonomi.

3. Prasarana dan Sarana Kebersihan

Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras memiliki sarana dan prasarana kebersihan dalam menunjang pengelolaan sampah. Adapun jumlah sarana dan prasarana di Kelurahan Sukaraja adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan di Kelurahan Sukaraja

No	Sarana dan Prasarana Kebersihan	Keterangan
1	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	1 lokasi
2	Gerobak Sampah	8 unit
3	Tong Sampah	52 buah
4	Satgas Kebersihan	2 kelompok
5	Anggota Satgas Kebersihan	4 orang
6	Pemulung	35 orang
7	Tempat Pengelolaan Sampah	Tidak Ada
8	Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Swadaya

Sumber: Profil Kelurahan Sukaraja Tahun, 2019

Berdasarkan Profil Kelurahan Sukaraja Tahun 2019, Kelurahan Sukaraja memiliki satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di belakang Puskesmas Sukaraja atau tepatnya di pemayangan ikan Sukaraja. Gerobak sampah yang ada di Sukaraja digunakan oleh satgas kebersihan di wilayah Sukaraja untuk mengangkut sampah rumah tangga. Ada delapan RT yang menggunakan jasa satgas kebersihan atau sering disebut SOKLI yaitu di lingkungan I yaitu RT 05, RT 12, RT 14, dan RT 16 sedangkan lingkungan II yaitu RT 02, RT 04, RT 07, dan RT 18 (berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan I pada Kamis 18 Februari 2016) Sementara itu, tong sampah yang ada di Sukaraja dan pengelolaan sampah merupakan swadaya masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- a. Bank Sampah yang diluncurkan WALHI Kota Bandar Lampung membereskan atau membenahi persoalan sampah pantai dalam pengoperasian tetapi pencapaian inovasi belum efektif dengan baik.
- b. Inovasi Bank Sampah dalam Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung.
- c. Inovasi Bank Sampah dari inovasi sebelumnya yaitu jaring sampah memiliki tingkat kerumitan berbeda dilihat dari pelaksanaan dari segi pembagian zona pembersihan dimana tidak didukung oleh SOP yang jelas serta fasilitas yang memadahi dan juga sumber daya manusia yang kurang.

6.2. Saran

- a. Merubah paradigma masyarakat bahwa kehadiran bank sampah untuk membantu mengurangi sampah di TPA
- b. Menggerakkan bank sampah agar tidak hanya berfungsi 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) tetapi sebagai media untuk menggerakkan dan pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi kreatif yang menggunakan bahan bekas (sampah non organik) agar mempunyai nilai guna dan nilai ekonomis.
- c. Diharapkan bagi masyarakat lebih peduli terhadap sampah dengan berpartisipasi menjadi nasabah di bank sampah. Karena melalui bank

sampah, masyarakat diajak untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing sesuai jenisnya kemudian disetorkan ke bank sampah. Hasil (output) dari kegiatan pengelolaan sampah akan mendapatkan keuntungan baik dari segi lingkungan menjadi bersih, masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Rukaesih. 2004. Kimia Lingkungan. Andi Yogyakarta : Yogyakarta
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. FISIP UI Press.
- Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC Jauhari, Heri. 2010. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi. Bandung: PustakaSetia.
- Komang dkk. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Manik, K.E.S. 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
- Mochamad Parmudi.2015, Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. Fisip UIN Walisongo. Jurnal atTaqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung
- Mukono HJ. 2006. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan Surabaya: Airlangga.University Press
- Notoatmodjo. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat : Prinsip-prinsip. Dasar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ririen Astria, 2009. Kinerja NGO. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,.
- Suryanto, 2018, Pengantar Ilmu Politik. Bandung : PustakaSetia. Suwarni,

Skripsi dan Jurnal

- Agung, D., & Gelbert, M. 1996. Pengolahan Sampah. MALANG: PPPGT/VEDC Malang.
- Anne, A. E. (2011). Studi Timbulan Sampah dan Komposisi Sampah sebagai Dasar Desain Sistem Pengumpulan Sampah di Kawasan Kampus Universitas Indonesia (Studi Kasus: 4 Fakultas dan 1 Fasilitas di Kampus Universitas Indonesia). Depok: (Skripsi) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Australian Aid. (2011). Scoping Study For Solid Waste Management in Indonesia. Jakarta: Indonesia Infrastructure Initiative.
- Benedictus, Antonius. (2010). Studi Tingkat Efektivitas Unit Pengolahan Sampah (UPS) Dalam Mengurangi Jumlah Sampah di Kota Depok (Studi Kasus UPS Gunadarma dan UPS Merdeka 2). Depok: (Skripsi) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Benyamin, Abdurahman 2014. Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpukan Pembangunan Daerah (Telaah kritis Regulasi dan Kebijakan terkait Kerjasama antar daerah di era Post Reformasi), Jurnal Pembangunan Daerah, Vol II, Edisi2
- Chatlya, A. 2016. Pengelolaan sampah pantai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (studi pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras).
- Darwati. Sri, 2019. Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai. Puslitbang Perumahan dan Permukiman, Kementrian PUPR, Jln Panyaungan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Artikel Pemakalah Paralel p-ISSN: 2527-533X
- Fauziah, N. A., Harianto, S. P., & Mahi, A. K. Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung.
- May 2003). Universit y of St. Gallen Department of Economics Discussion Paper, (2003-14).
- Rayaningsih, Ella Hasturi. 2018. Inovasi Program Pattasaki Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Makassar. Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar

Tyran, J. R., & Sausgruber, R. 2003. The diffusion of policy innovations. An experimental investigation. An Experimental Investigation

Tchobanoglous, G., & Theisen, H. Vigils. 1993. Integrated solid waste management.
- McGraw Hill, New York

Wahyudin. Gledys Deyana, Arie Afriansyah. 2020. Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional.. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 8, No 33 2020

Waras, R. P. D. K. B., Waras, K. B., & Wahyuni, F. 2017. Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk Lampung. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 8(1).

Wijayanti, L. 2012. Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. jurnal pembangunan wilayah & kota, 8(2), 126-137.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No 18 Tahun 2008, Pengelolaan Sampah, 2008

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, 2012

Permen PU No. 03/PRT/M/2013, Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sumber Internet

<https://harianmomentum.com/read/29752/h-21-pilkada-beberapa-apk-paslonkada-masih-melanggar>

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>